

Tekanan Rezim Pengungsi Internasional terhadap Kebijakan Pemerintah Bangladesh atas Pengungsi Rohingya (2013-2018)

Fahmi Haidar Hidayat

Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
E-mail: fahmihaidar96@gmail.com

ABSTRACT

Bangladesh has received Rohingya refugees for a long time. The increasing number of Rohingya refugees entering Bangladesh made the government reject it. Threatening all aspects around the refugee camp area is one of the reason. In 2013, Bangladesh issued a policy "Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh" which contained a ban on entry and supervision of undocumented Rohingya. However, in 2016 and 2017, Bangladesh received large numbers of Rohingya refugees. There is pressure from the international refugee regime, making Bangladesh accept Rohingya refugees again. In addition, there are donor commitments that make Bangladesh benefit from the arrival of these refugees. In the end, the pressure and assistance of the international refugee regime had its own influence for Bangladesh to immediately open its borders, receive and serve Rohingya refugees well.

Keywords: *Rohingya, international refugee regime, pressure of the international refugee regime, assistance of the international refugee regime, refugee policy, Bangladesh.*

Bangladesh telah menerima pengungsi Rohingya sejak lama. Bertambahnya pengungsi rohingya yang masuk dalam Bangladesh, membuat pemerintah menolaknya masuk. Mengancam segala aspek di sekitar wilayah pengungsian merupakan salah satu alasannya. Pada tahun 2013, Bangladesh mengeluarkan kebijakan "Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh" yang mana berisikan pelarangan masuk dan mengawasi bagi Rohingya yang tidak berdokumentasi. Tetapi, pada tahun 2016 dan 2017, Bangladesh menerima banyak pengungsi Rohingya dalam jumlah besar. Adanya tekanan rezim pengungsi internasional, membuat Bangladesh menerima kembali pengungsi Rohingya. Selain itu, terdapat komitmen donor yang membuat Bangladesh mendapatkan keuntungan dari datangnya pengungsi tersebut. Pada akhirnya, tekanan dan bantuan rezim pengungsi internasional memberikan pengaruh tersendiri bagi Bangladesh untuk segera membuka perbatasannya, menerima serta melayani pengungsi Rohingya dengan baik.

Kata-kata kunci: *Rohingya, rezim pengungsi internasional, tekanan rezim pengungsi internasional, bantuan rezim pengungsi internasional, kebijakan pengungsi, Bangladesh.*

Bangladesh telah lama berhubungan dengan Rohingya sejak berabad-abad yang lalu. Hubungan antara masyarakat Rohingya dengan Bengal telah terjadi selama abad ke-15 melalui kerja sama militer, perdagangan, dan agama. Selama abad ke-15 dan 16, terjadi infiltrasi Muslim dari Bengal ke Arakan (Rakhine State) (Wardhani 2012). Selain itu, sebelum batas negara antara Myanmar dan Bangladesh ada, masyarakat Rohingya pada masa lalu telah melakukan perjalanan bolak-balik secara leluasa selama berabad-abad menyeberangi sungai Naff, yang sekarang secara luas dipandang sebagai batasan antara kedua negara (Farzana 2017). Hingga kemudian, Rohingya menetap di wilayah Rakhine State yang masuk dalam teritori Myanmar.

Rohingya kemudian menjadi minoritas di Myanmar. Status Rohingya di Myanmar kemudian menjadi permasalahan. Tidak diakuinya mereka sebagai satu dari 135 etnis yang mendiami Myanmar menjadikan masyarakat Rohingya korban junta militer di negara tersebut (Wardhani 2012). Masyarakat Rohingya menjadi korban sistem buruk yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dalam bentuk penindasan, penahanan, dan diskriminasi (Zaw 2007). Tindakan Pemerintah Myanmar tersebut menyulut ketegangan di antara negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Myanmar, seperti Bangladesh dan Thailand. Walaupun telah menetap cukup lama, Rohingya tetap tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar (Wardhani 2012).

Masyarakat Rohingya datang ke Bangladesh dalam skala besar melalui tiga gelombang, yakni tahun 1948, 1978, 1991/1992. Pada tahun-tahun tersebut, Rohingya mengungsi untuk mencari perlindungan akibat perilaku buruk oleh junta militer Myanmar. Bangladesh melihat gelombang kedatangan Rohingya sebagai korban dari kebijakan Pemerintah Myanmar yang memerlukan bantuan kemanusiaan. Namun, setelah menyaksikan aliran migrasi paksa para Rohingya yang terus menerus masuk ke dalam wilayah perbatasan Bangladesh, Pemerintah Bangladesh mulai khawatir karena aliran migrasi internasional akan mengancam keamanan nasional Bangladesh (Merry dan Olivia 2014).

Bentuk penolakan pertama kali melalui protes yang dilakukan oleh Presiden Bangladesh, Ziaur Rahman, pada tahun 1978, yang dengan tegas menyatakan bahwa telah terjadi pengusiran yang tidak manusiawi terhadap masyarakat Muslim Burma

(Myanmar). Tidak hanya itu, Bangladesh juga mengeluarkan nota protes mengenai “repressive measures resulting in the forcible expulsion of their nationals belonging to ethnic and religious minorities” (Anand 1978). Lewa (2010), juga menambahkan bahwa bentuk penolakan lain muncul seperti, media dan elit politik Bangladesh untuk pertama kalinya melakukan kampanye anti-Rohingya pada tahun 2009. Kelompok Anti-Rohingya Committees kemudian muncul menyebarkan kebencian pada kehadiran Rohingya, khususnya pada pengungsi tak terdaftar dan menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap kedatangan Rohingya (Lewa 2010).

Kebijakan deportasi informal yang lebih dikenal dengan “*push back*” policy dilakukan oleh Bangladesh di tahun 2012. Pada tanggal 28 Juli 2012, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, telah mengatakan bahwa negaranya tidak mampu menampung lebih banyak pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan yang terjadi di Myanmar. Pernyataan itu menyusul laporan bahwa pihak berwenang Bangladesh telah menolak banyak pencari suaka. Sheikh Hasina membela kebijakan tersebut, dengan mengatakan Bangladesh telah kelebihan penduduk. Telah ada sekitar 300.000 pengungsi Rohingya ketika itu yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara tersebut. Hasina mengatakan bahwa bukan tanggung jawab negaranya untuk membantu semua pengungsi (Al Jazeera 2012). Akibatnya, lembaga-lembaga internasional ditolak masuk oleh Bangladesh karena ditakutkan memunculkan kedatangan pengungsi yang lebih besar (Ahmed 2012). Beberapa organisasi non pemerintah seperti France’s Doctors without Borders (MSF), Action Against Hunger (ACF), dan Britain’s Muslim Aid UK telah diminta untuk berhenti memberikan bantuannya di wilayah Cox’s Bazaar (Al Jazeera 2012).

Kabinet Bangladesh menyetujui adanya kebijakan “Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh” pada tanggal 9 September 2013, yang difokuskan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya (Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh 2014). Terdapat beberapa poin dalam kebijakan tersebut antara lain, untuk memperkuat kewaspadaan di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar dalam rangka menghentikan penyusupan para pengungsi Rohingya, mengawasi pengungsi Rohingya yang tidak terdokumentasi, melarang bantuan organisasi non-pemerintah di kamp-kamp pengungsian serta menciptakan tekanan internasional di Myanmar

untuk membawa Rohingya kembali (Yesmin 2016). Dari strategi tersebut kemudian terbentuk National Task Force (NTF), yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri Bangladesh, serta termasuk 22 kementerian dan lembaga terkait, yang mana memberikan pengawasan dan panduan strategis terhadap respons dari Pemerintah Bangladesh (Strategic Executive Group 2018). Adanya peraturan ini dibingkai dari pendekatan keamanan nasional yang menekankan peningkatan kapasitas yang ditingkatkan dari badan keamanan perbatasan. Kebijakan ini juga dibentuk oleh kekhawatiran Pemerintah Bangladesh atas peningkatan migran ekonomi yang tidak diinginkan dari Myanmar (Yesmin 2016).

Namun, pengetatan pintu perbatasan kemudian mulai dibuka perlahan, akibat dari gelombang masuk pengungsi Rohingya ke Bangladesh yang masif. Sekitar bulan Oktober 2016, ketika konflik kembali pecah, sekitar 43.000 Rohingya diizinkan masuk wilayah Bangladesh. Walaupun demikian, tidak selamanya Bangladesh membuka perbatasannya. Habib (2016) memberikan contoh penolakan Bangladesh ketika pada bulan November 2016, lebih dari 100 orang Rohingya yang datang dengan kapal nelayan kecil dicegah oleh Bangladesh Coast Guard (BCG) dan dihalau untuk kembali ke Myanmar (Habib 2016). Meskipun pernyataan protes untuk menolak kedatangan Rohingya ke Bangladesh terus didengungkan, nyatanya Bangladesh kembali menerima pengungsi Rohingya. Insiden yang memicu arus masuk pengungsi itu terjadi pada 25 Agustus 2017, ketika sebuah kelompok yang menamai dirinya Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang beberapa kantor polisi dan pos-pos dengan tidak menggunakan senjata di Rakhine State, Myanmar. Hasilnya adalah penindasan besar oleh Tatmadaw (Angkatan Darat Myanmar) pada penduduk lokal Rohingya. Pada akhirnya, banyak pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Bangladesh (Bhattacharjee t.t.).

Sikap Pemerintah Bangladesh mulai melunak dengan melonggarkan pembatasan terhadap kelompok bantuan atau *non government organizations* (NGO) yang bekerja di kamp pengungsian (Nurfuadah 2017). Seperti yang diketahui bahwa jumlah pengungsi Rohingya sebelum gelombang besar tahun 2017 dan 2016 yakni sebesar 231.958 pada tahun 2015 (UNHCR t.t.). Namun, setelah Bangladesh membuka perbatasannya secara berkala, lebih dari 708.000 pengungsi Rohingya masuk sejak tanggal 25 Agustus 2017 hingga 31 Agustus 2018 (terlihat dalam Grafik 1.1.) yang mana jumlah signifikan ini lebih besar dari pada gelombang pengungsi

sebelumnya. Data UNHCR pada September 2018 memperlihatkan pengungsi Rohingya terus berdatangan hingga sejumlah 728.306 orang sejak 25 Agustus 2017 (UNHCR 2018). Oleh karena itu, jumlah Rohingya di Bangladesh meningkat lebih dari 238% (UNHCR t.t.).

Tekanan Maupun Pengaruh Rezim Pengungsi Internasional terhadap Respons Kebijakan Pemerintah Bangladesh atas Rohingya

Kebijakan Bangladesh untuk membuka pintu perbatasannya, tidak terlepas dari adanya tekanan dari rezim pengungsi internasional. Seperti yang diketahui institusi yang ada dalam rezim pengungsi internasional di antaranya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); maupun entitas lain yang termasuk seperti organisasi pengungsi dan bantuan internasional, negara donor, lembaga sukarela, media, maupun individu seperti akademisi yang terlibat dalam urusan pekerjaan pengungsi (Jacobsen 1996). Tekanan yang diberikan oleh rezim pengungsi internasional dilakukan oleh institusi di dalamnya agar pengungsi mendapatkan akses dan menjamin perlindungan yang layak oleh pemerintah *host country*. Tekanan-tekanan tersebut berupa institusi atau negara-negara donor mendorong perlakuan yang menguntungkan terhadap pengungsi dengan menjanjikan bantuan atau bahkan mengancam untuk menahan bantuan bilateral atau kontribusinya yang disalurkan salah satunya melalui UNHCR (Jacobsen 1996).

Tekanan maupun pengaruh rezim pengungsi internasional kemudian dapat terlihat dari adanya laporan *Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 30th Session No. A/HRC/WG.6/30/BGD/1* yang dirilis bulan Mei 2018 oleh United Nations of Human Rights Council (UNHRC). Dalam laporan tersebut memuat *2nd Universal Periodic Review (UPR)* tahun 2013 (lihat Tabel 2.1.) yang memuat rekomendasi dari beberapa negara serta lembaga terkait, ditujukan dan dilaksanakan untuk Bangladesh, salah satunya mengenai isu pengungsi Rohingya. Sejak UPR siklus kedua Bangladesh 2013 muncul, terdapat sejumlah perkembangan yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi (UNHCR 2018). Sejak UPR siklus kedua pada tahun 2013 pula, Pemerintah Bangladesh telah melakukan berbagai langkah administratif, legislatif, dan kebijakan untuk memperkuat mekanisme kelembagaannya serta untuk memenuhi komitmennya terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengenai pengungsi Rohingya (UNHRC 2018).

Setidaknya beberapa rekomendasi tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Bangladesh yang tertuang dalam laporan UPR tahun 2018 tersebut. Dalam hal penampungan pengungsi, Bangladesh telah mengalokasikan 4.707 hektar lahan termasuk kawasan hutan untuk membangun tempat penampungan bagi para Rohingya. Selain itu Bangladesh menyediakan mereka dengan makanan, fasilitas medis, dan layanan dasar lainnya. Dalam hal memastikan kelancaran distribusi bantuan dan menjaga keamanan Rohingya, 11 pos pemeriksaan polisi tambahan telah dibentuk, lebih dari 1.200 aparat penegak hukum dan 1.700 personel militer telah dikerahkan di Cox's Bazar. Hingga kemudian dalam laporan tahun 2018 juga, Bangladesh disebutkan telah menyediakan akses penuh ke semua mitra dan lembaga internasional termasuk PBB, NGO internasional, aktor kemanusiaan, media, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk bekerja di Cox's Bazar dan mendukung Rohingya (UNHRC 2018).

Walaupun demikian, tidak semua rekomendasi dari beberapa negara tersebut dilaksanakan oleh Bangladesh. Hal ini dapat dilihat dari poin rekomendasi ratifikasi Konvensi 1951, Protokol 1967, serta Konvensi 1954 dan 1961 yang diutarakan oleh Austria pada nomor 130.7. Menurut Bangladesh, meskipun Bangladesh bukan merupakan pihak yang meratifikasi konvensi maupun protokol tersebut, Bangladesh telah melindungi pengungsi Rohingya dengan baik. Selain itu, Bangladesh juga memberikan posisi "*noted*" pada rekomendasi Republik Ceko pada nomor 130.27. Bangladesh beralasan bahwa negaranya selalu memperluas perlindungan dan bantuan untuk pengungsi terhadap populasi minoritas Muslim atau pengungsi Rohingya dari Rakhine State, Myanmar, sesuai dengan rezim perlindungan internasional dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia mereka (UNHCR 2018).

Selain itu, *non government organizations* (NGO) juga memberikan tekanan serta berpengaruh terhadap respons Bangladesh ketika adanya upaya penutupan pintu perbatasan bagi Rohingya, termasuk terjadinya pembatasan NGO dan akses bantuan yang akan diberikan. Bangladesh memerintahkan Doctors Without Borders (MSF), Action Against Hunger (ACF), dan Britain's Muslim Aid untuk menghentikan pemberian bantuan kepada pengungsi Rohingya yang menyeberangi perbatasan untuk melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan di wilayah Rakhine State, Myanmar tahun 2012 (Mizzima News 2012). Kemudian, ketika arus pengungsi yang

datang tahun 2016, organisasi bantuan juga dilarang masuk. Dalam laporan Amnesty International (2016) setidaknya sepanjang Oktober dan November 2016, Pemerintah Bangladesh telah menolak memberikan bantuan kepada pengungsi yang baru tiba dengan alasan untuk menghindari menciptakan faktor penarik yang lebih besar.

Badan bantuan internasional atau NGO yang ada kala itu telah membuat permintaan resmi kepada pemerintah untuk menilai kebutuhan yang diperlukan, dan untuk membantu para pengungsi yang baru tiba, namun permintaan ini telah ditolak. Seperti contoh, UNHCR telah meminta pemerintah untuk dapat mendata dan memberikan bantuan kepada para pengungsi yang baru tiba ketika setelah melintasi perbatasan. Langkah tersebut juga diikuti oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dengan membuat permintaan resmi dari pihak berwenang untuk diberikan akses terhadap pengungsi yang baru tiba yang mana sedang membutuhkan pertolongan (Amnesty International 2016).

Tekanan itu kemudian membawa implikasi positif dengan adanya respons kebijakan Bangladesh secara informal yang mana organisasi bantuan internasional dapat diizinkan beroperasi dalam kamp pengungsian. Dalam laporan Amnesty International (2016) Pemerintah Bangladesh paling tidak secara informal, sejak awal Desember 2016 mulai melonggarkan sebagian pembatasan bantuan kepada para pengungsi baru. Pada tanggal 6 Desember, International Organization for Migration (IOM) melaporkan telah memberikan beberapa bantuan dasar, termasuk barang-barang non-makanan seperti pakaian dan selimut, kepada para pengungsi yang baru saja tiba di kamp. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan kebijakan tersebut bersifat informal, organisasi bantuan lainnya telah diberitahu secara pribadi oleh pemerintah setempat bahwa mereka dapat memberikan bantuan kepada pengungsi yang baru tiba, terutama dalam bentuk barang-barang non-makanan, dan memungkinkan para pengungsi untuk mengakses layanan lain. Akan tetapi, pemerintah belum bersedia secara resmi memberikan mereka izin untuk melakukannya untuk menghindari faktor penarik atau bertambahnya pengungsi semakin besar (Amnesty International 2016). Setelah tahun 2016 kemudian, tren penerimaan kehadiran NGO oleh Pemerintah Bangladesh terus menunjukkan tren positif. Pada awal Oktober 2017, 35 NGO diketahui beroperasi diikuti pada bulan Desember jumlah tersebut berkembang menjadi setidaknya 150 NGO yang dikenal

responsif terhadap krisis. NGO tersebut termasuk setidaknya 13 NGO lokal, 45 nasional, dan 66 internasional (Strategic Executive Group 2018).

Dinamika tekanan juga dilakukan oleh badan-badan PBB dan negara donor tahun 2016 dan 2017. Hal ini terjadi akibat Bangladesh melakukan penghalauan kembali Rohingya yang berusaha masuk dalam wilayahnya. Dalam laporan Amnesty International (2016) menurut BCG, setidaknya 2.320 orang Rohingya dihalau kembali atau *push back* ke Myanmar selama bulan November 2016, dan setidaknya 2.400 orang tambahan lainnya selama kurang lebih paruh pertama bulan Desember 2016. UNHCR sebagai badan PBB urusan pengungsi meminta Bangladesh untuk membuka perbatasan dan menerima pengungsi Rohingya yang datang di tahun 2016 tersebut. Bangladesh merasa tertekan, terlihat dari para pejabat Kementerian Luar Negeri yang bersikap kritis terhadap badan pengungsi PBB, UNHCR. Mereka menuduh bahwa UNHCR selalu memberikan tekanan yang tidak semestinya pada Bangladesh. Selain itu, demi atas nama keselamatan serta martabat para pengungsi, menurutnya hal tersebut pula yang dapat menunda repatriasi Rohingya selama beberapa dekade yang merupakan keinginan Bangladesh sejak lama. Hal itu juga yang tampaknya mendorong lebih banyak pengungsi Rohingya untuk memasuki Bangladesh (Karim 2016).

Tekanan yang diberikan terhadap Bangladesh ternyata memberikan dampak perubahan respons. Pada akhir November 2016, pihak berwenang Bangladesh tampak secara tidak resmi melonggarkan kendali mereka atas perbatasan untuk semakin memungkinkan pengungsi “pilihan” masuk. Laporan dari sumber-sumber terpercaya menegaskan bahwa personel Bangladesh Guard Border (BGB) terkadang memungkinkan pengungsi yang paling jelas rentan khususnya wanita dan anak-anak untuk diperbolehkan menyeberangi perbatasan. Memang, tidak jelas sejauh mana hal ini dapat terjadi atas prakarsa personel BGB secara individu di tingkat lokal atau telah disetujui oleh pemerintah di tingkat pusat. Meskipun demikian, Amnesty Internasional (2016) mengkonfirmasi setidaknya terdapat satu pejabat Pemerintah Bangladesh yang juga secara terbuka menegaskan bahwa ini adalah praktiknya.

Pada tanggal 29 Agustus 2017, tekanan kembali muncul dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, yang mendesak Pemerintah Bangladesh untuk terus menerima warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari

tindak kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar. Hal ini dikarenakan PBB mendapat laporan bahwa penjaga perbatasan (BGB) mencoba untuk menghalau masuk ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di dekat desa Gumdhum. Selain itu, Bangladesh juga menghadapi tekanan yang memuncak dari UNHCR dan lembaga internasional lainnya untuk menyusun strategi yang lebih realistis untuk mengelola krisis pengungsi Rohingya (Milton et al. 2017).

Bangladesh pada awalnya enggan membuka perbatasannya untuk pengungsi Rohingya. Tak lama dari berbagai tekanan internasional yang ada muncul respons positif dari Bangladesh. Seperti yang dikutip dari laporan laman BBC (dalam Dikarma 2017), Sabtu, 2 September 2017, para pengungsi Rohingya telah dapat melintasi perbatasan Bangladesh. Pengungsi dilaporkan menyeberangi perbatasan tanpa dihentikan atau dicegah oleh aparat kepolisian Bangladesh. Di bawah tekanan internasional, Perdana Menteri Sheikh Hasina mengubah sikapnya dengan membuka pintu perbatasannya. Hal ini dapat terlihat ketika Hasina hadir di kamp pengungsian Kutupalong pada tanggal 12 September 2017. Hasina telah bertemu dengan beberapa pengungsi dan berjanji untuk memberi mereka dukungan bantuan sampai mereka kembali ke negara asal mereka yakni Myanmar. Bangladesh juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Pemerintah Myanmar agar membawa para pengungsi kembali dan memperlakukan mereka dengan baik (Al Jazeera 2017). Al Jazeera (2017) menyatakan pernyataan Hasina tersebut keluar, setelah Bangladesh dikritik karena mengembalikan ratusan pengungsi Rohingya dari perbatasannya dengan Myanmar, serta tidak memberikan bantuan yang cukup kepada para pengungsi. Setelah dibukanya pintu perbatasan, pengungsi Rohingya terus berdatangan. Menurut Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, selama paruh kedua Maret 2018, jumlah pengungsi baru di kamp-kamp di Bangladesh terus naik dengan cepat hingga mencapai 1.000 orang per minggu (ICC 2018).

Bantuan Rezim Pengungsi Internasional: Mediator Repatriasi dan Bantuan Langsung kepada Penduduk Lokal Bangladesh

Setelah menerima pengungsi Rohingya yang cukup banyak, Bangladesh menerima bantuan dari adanya komitmen donor. Bantuan yang diterima Bangladesh, salah satunya ialah adanya mediator repatriasi. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada

tahun 2005 program repatriasi berhenti, dan UNHCR tidak setuju dengan program tersebut dengan alasan tidak layak bagi pengungsi Rohingya. Pada tahun 2013 rencana negosiasi repatriasi kembali bergulir (McLaughlin 2013). Namun, kesepakatan tidak kunjung dicapai. Seperti yang diketahui, Bangladesh telah mendorong dimulainya kembali program repatriasi tersebut sejak Myanmar menolak untuk memperpanjang perjanjian awal tahun 2005. Permasalahannya ialah bahasa yang tidak jelas dan tidak adanya tanggal yang pasti dalam komitmen tersebut sehingga tidak memberi pertanda baik bagi proses repatriasi.

Setelah adanya gelombang besar pengungsi Rohingya di tahun 2017, keinginan Bangladesh untuk melakukan repatriasi kembali menguat. Bangladesh menginginkan sekitar 646.072 pengungsi kala itu untuk dipulangkan segera mungkin, karena menurutnya Rohingya merupakan ancaman keamanan nasional dan memberikan tekanan pada ekonominya sendiri. Pada dasarnya, Bangladesh ingin arus masuk pengungsi untuk berhenti secara permanen. Langkah awal Bangladesh terlihat dari parlemen negara yang telah mengadopsi resolusi untuk menempatkan tekanan diplomatik terhadap Myanmar untuk memulangkan semua pengungsi Rohingya (Kapur 2018). Perdana Menteri Sheikh Hasina, pada 23 November 2017 menyetujui keputusan perjanjian bilateral yang kontroversial dengan pihak berwenang di Nay Pyi Taw, ibukota Myanmar. Myanmar dan Bangladesh menandatangani kesepakatan mengenai pemulangan sukarela pengungsi Rohingya (UNHCR 2017). Baik organisasi internasional maupun pengungsi tidak dikonsultasikan dalam merancang rencana tersebut. Banyak pengungsi Rohingya khawatir tentang pemulangan paksa yang terburu-buru, dan penolakan terhadap rencana tersebut berkembang di dalam dan di luar kamp (Alam 2018).

Hingga kemudian pada 25 November 2017, Bangladesh dan Myanmar telah setuju untuk meminta bantuan dari UNHCR untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya dengan aman yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar (Paul 2017). Pada 8 Desember 2018, UNHCR mengeluarkan pernyataan tentang repatriasi atau pemulangan kembali yang ditandatangani antara Myanmar dan Bangladesh, dengan menekankan bahwa kondisi di Myanmar belum kondusif untuk kembali. Menurutny, semua pengungsi memiliki hak untuk kembali, tetapi ini harus terjadi

secara sukarela dan hanya ketika pengungsi merasa pada waktu dan keadaannya yang tepat (UNHCR 2017).

Pada perjanjian tersebut, awalnya UNHCR, bukanlah pihak dalam perjanjian tetapi itu direferensikan dalam dokumen teks perjanjian repatriasi tersebut. UNHCR kemudian menyatakan siap membantu kedua pemerintah bekerja untuk menemukan solusi bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh dengan memenuhi standar internasional bagi pengungsi dan hak asasi manusia, dan memastikan bahwa suara pengungsi terwakili (UNHCR 2017). Dalam pandangan UNHCR, sebenarnya perjanjian tersebut termasuk perjanjian repatriasi sukarela tripartit. Berdasarkan teks perjanjian tersebut, UNHCR mendorong bahwa kedua pemerintah telah sepakat untuk bekerja untuk solusi yang “komprehensif dan tahan lama”, untuk menahan diri dari menyusun maupun menerapkan kebijakan diskriminatif dalam bentuk apa pun yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati secara universal, serta bahwa Myanmar menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State (UNHCR 2017). Hal ini dapat terjadi setelah Bangladesh melonggarkan pintu perbatasannya bagi pengungsi Rohingya pada gelombang masuk pengungsi tahun 2017.

Keterlibatan UNHCR kemudian semakin terlihat ketika pada tanggal 13 April 2018 di Jenewa, Swiss, Komisioner Tinggi UNHCR, Filippo Grandi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Mohammad Shahidul Haque menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) tentang pemulangan sukarela pengungsi Rohingya. Dengan tidak adanya perjanjian tripartit antara UNHCR, Myanmar dan Bangladesh, UNHCR terus terlibat dengan kedua pemerintah dalam perundingan tentang dua MoU yang terpisah, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa repatriasi di masa depan dilakukan sesuai dengan standar internasional yakni kesukarelaan, keamanan, dan bermartabat (UNHCR 2018). Pada akhirnya tanggal 6 Juni 2018, di Nay Pyi Taw, UNHCR beserta dengan UNDP (UN Development Programme) menandatangani sebuah MoU tripartit dengan Pemerintah Republik Uni Myanmar mengenai repatriasi pengungsi Rohingya. MoU ini adalah langkah pertama dan penting untuk membangun kerangka kerja sama antara PBB dan Pemerintah Myanmar yang bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi para pengungsi (UNDP 2018).

Dengan MoU ini pula, tim-tim dari PBB akan diberikan akses tanpa hambatan untuk masuk ke Rakhine, termasuk ke tempat-tempat asal pengungsi dan daerah-daerah potensial yang kiranya tepat bagi Rohingya untuk kembali. Menurut perjanjian MoU awal, hal ini akan memungkinkan PBB untuk menyediakan kegiatan perlindungan, tetapi juga untuk menilai apakah daerah tersebut kondisinya aman bagi para pengungsi yang kembali (Aung 2018). Sejak perjanjian ditandatangani, setidaknya sejumlah 200 orang yang kembali ke Myanmar. Pengungsi Rohingya yang kembali ke Myanmar akan ditempatkan di lokasi penerimaan awal yakni di kamp Nga Khu Ra dan Taungpyoletwei, dengan lokasi transit di kamp Hla Po Khaung yang mana dapat menampung sebanyak 30.000 orang (Dhaka Tribune 2018, dalam Jawa Pos 2018).

Di sisi lain, sebelum gelombang masuk pengungsi besar, penduduk lokal di area terdampak pengungsian merupakan daerah miskin. Rata-rata, 33% hidup di bawah garis kemiskinan dan 17% di bawah garis kemiskinan ekstrim (Inter-Sector Coordination Group 2018). Oleh karena itu, bantuan juga menysasar pada penduduk lokal Bangladesh terdampak. Strategi *Joint Response Plan (JRP) March-December 2018* kemudian dibuat bagi penduduk lokal terdampak (Inter-Sector Coordination Group 2018). Pada tanggal 6 Maret 2018, Badan-badan PBB dan mitra NGO merilis *2018 Joint Response Plan for the Rohingya Humanitarian Crisis* di Jenewa oleh Komisioner Tinggi UNHCR Filippo Grandi, Direktur Jenderal International Organization for Migration (IOM), William Swing, dan Resident Coordinator PBB di Bangladesh, Mia Seppo dengan menyerukan nilai USD 951 juta untuk memenuhi kebutuhan mendesak bagi pengungsi Rohingya, dan lebih dari 330.000 penduduk lokal Bangladesh yang terdampak (IOM 2018). JRP tersebut mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan inklusif yang mana dalam programnya mendukung penduduk lokal yang terkena dampak.

Keuntungan Bangladesh dari Bantuan Rezim Pengungsi Internasional atas Penerimaan Pengungsi Rohingya

Terdapat fakta yang menunjukkan bahwa adanya rezim pengungsi internasional membawa keuntungan tersendiri bagi Bangladesh, salah satunya melalui UNHCR. Hal ini diungkapkan oleh Parnini (2013) yang menyatakan bahwa Bangladesh akan tertarik untuk melihat kehadiran UNHCR dan para pengungsi, bukan karena alasan

kemanusiaan tetapi hanya demi menghasilkan keuntungan dari kehadiran mereka. Dalam konteks ini, US Committee for Refugees dalam laporannya mencatat bahwa:

“Despite Dhaka’s claim that caring for the Rohingya is an economic burden, Bangladesh has borne little of the cost of caring for the refugees. With the exception of \$2.5million that Bangladesh spent on relief prior to the UNHCR involvement, UNHCR, donor governments, and non-governmental organizations (NGOs) have paid for almost all of the relief operation. If anything, the UNHCR relief operation has led to a net financial gain for the Bangladesh government and its citizens, as it has increased employment.” (Parnini 2013).

Keuntungan yang didapat oleh Bangladesh cukup besar. Namun kemudian, Parnini (2013) menjelaskan bahwa korupsi menambah momentum keuntungan yang berkontribusi terhadap munculnya serangkaian “*power blocs*” atau lobi-lobi keuntungan. Hal tersebut tidak hanya di tingkat kebijakan tinggi tetapi yang lebih penting di tingkat menengah dan bawah, sehingga berdampak pula pada kelanjutan kehadiran UNHCR dan para pengungsi. Parnini (2013) juga menyatakan “the middle and the lower functionaries of both governmental and non-governmental organizations are powerful enough to create conditions for putting a halt to unprofitable changes and reproducing the postrefugee status quo”.

Menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dan UNHCR, total kebutuhan dana untuk pengungsi Rohingya dalam jangka waktu September 2017 hingga Februari 2018 akan menjadi USD 517,8 juta dengan rician, USD 434 juta + USD 83,8 juta dana tambahan. Di sisi lain, dalam rencana tanggap kemanusiaan dalam waktu September 2017 hingga Februari 2018, Pemerintah Bangladesh telah menyumbangkan USD 4,37 juta yang setara dengan 1% dari total kebutuhan dana yang diajukan badan PBB sebanyak USD 434 juta (Financial Tracking System 2018, dalam Khatun 2018). Hal ini kemudian sejalan dengan laporan US Committee for Refugees (dalam Parnini 2013) yang menyatakan bahwa hanya sedikit yang dikeluarkan Bangladesh untuk pengungsi Rohingya. Di sisi lain, bila menilik keuntungan yang didapat Bangladesh dapat terlihat dari adanya bantuan langsung bagi penduduk lokal terdampak, baik dari segi rehabilitasi infrastruktur, bantuan pangan, pendidikan dan lainnya.

Selain itu, dalam laporannya US Committee for Refugees (dalam Parnini 2013) menyatakan bahwa keuntungan yang didapat ialah meningkatkan pekerjaan bagi

penduduk lokal Bangladesh. Seiring dengan pernyataan tersebut, dalam tulisannya, Khan (2018) menyatakan terdapat beberapa dampak ekonomi baik dari krisis Rohingya. Para buruh atau pekerja harian beralih dari pasar lokal menjadi bekerja dengan agen-agen organisasi bantuan di kamp-kamp pengungsian karena pekerjaan telah tersedia. Fakta tersebut kemudian sejalan dengan data survey yang dikeluarkan Xchange Foundation (2018) yang menunjukkan bahwa penduduk lokal Bangladesh merasakan adanya peningkatan pekerjaan setelah adanya kedatangan gelombang Rohingya tahun 2017. Lebih dari setengah penduduk Ukhia (393 atau 53%) merasa puas dengan jumlah kesempatan kerja di wilayah mereka dibandingkan dengan hanya dua dari lima (378 atau 40%) penduduk Teknaf. Sejumlah 49% responden di *Union* (setingkat kecamatan), pengungsi Rohingya juga puas dengan jumlah kesempatan kerja di wilayah pengungsian, dibandingkan dengan 40% dari mereka yang bekerja di *Union* yang wilayahnya tanpa adanya jumlah Rohingya yang signifikan (Xchange Foundation 2018).

Keuntungan bagi Bangladesh juga dapat dilihat dari adanya kehadiran mediator bagi proses repatriasi yang telah lama diinginkan oleh Bangladesh. Pada dasarnya *international monitors* atau pengawas internasional merupakan komponen penting dari setiap proses pemulangan atau repatriasi yang mengawasi kembalinya mereka yang selamat dari tempat pengungsian ke negara asal mereka. Hal ini kemudian menjadi pragmatis untuk memasukkan UNHCR dalam seluruh proses repatriasi untuk memfasilitasi aspek keselamatan dan mendukung upaya nasional apa saja untuk bantuan pemukiman kembali, rekonstruksi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pembangunan (Kapur 2018). Hal ini juga yang membuat Bangladesh menggandeng UNHCR pada proses perjanjian repatriasi 2018. UNDP kemudian juga ikut bergabung dalam memediasi proses MoU repatriasi dengan Myanmar bulan Juni 2018.

Kesimpulan

Berawal dari tidak diakuinya Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang berada di Myanmar, membuat mereka menyandang sebagai status warga yang tidak berdokumentasi. Selain itu, keadaan Rohingya diperparah dengan adanya tindakan represif yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Oleh karena itu, Rohingya menyelamatkan diri dengan keluar dari Myanmar ke negara-negara yang dianggap

aman, seperti Bangladesh. Namun, jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh semakin lama bertambah banyak. Hal ini yang kemudian membuat Bangladesh menolak adanya pengungsi Rohingya masuk ke dalam wilayahnya. Kebijakan “Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh” disahkan pada 2013 berisikan penolakannya terhadap Rohingya ilegal. Namun faktanya, ketika konflik kembali pecah tahun 2016 dan khususnya 2017, Bangladesh kembali menerima lebih dari 700.000 pengungsi.

Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini kemudian mengungkapkan bahwa Bangladesh menerima tekanan dalam menerima pengungsi Rohingya dan juga Bangladesh mendapatkan keuntungan dari hadirnya pengungsi tersebut. Tekanan yang dimaksud berasal dari pihak-pihak yang berada pada rezim pengungsi internasional. Lembaga-lembaga dan individu-individu dalam komunitas internasional yang peduli dengan kesejahteraan pengungsi yang ada dalam rezim ini kemudian menekan Pemerintah Bangladesh. Tekanan yang didapat berupa desakan kepada Bangladesh untuk menerima lebih banyak pengungsi dan memperlakukan pengungsi Rohingya dengan baik. Salah satunya, melalui forum Universal Periodic Review (UPR) (berada di bawah UNHRC) yang berisikan beberapa rekomendasi negara-negara yang meminta Bangladesh untuk menerima pengungsi Rohingya dengan tidak membatasi ataupun menghalangi memasuki wilayahnya dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Selain itu, NGO maupun badan-badan PBB juga mendesak Bangladesh untuk membuka perbatasannya bagi Rohingya.

Setelah melonggarkan kebijakannya dengan membuka pintu perbatasannya bagi Rohingya, Bangladesh mendapatkan bantuan dari adanya komitmen donor. Bantuan tersebut salah satunya berupa mediator repatriasi. Repatriasi Rohingya telah lama diinginkan oleh Bangladesh. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2017, Bangladesh meminta UNHCR untuk mendampingi Bangladesh dalam merepatriasi Rohingya. Setelah adanya perjanjian antara Bangladesh, Myanmar, maupun UNHCR, proses repatriasi dapat berjalan bertahap. Selain itu, bantuan juga pada akhirnya diberikan pada penduduk lokal terdampak. Program *Joint Response Plan (JRP) March-December 2018* kemudian digagas untuk penduduk lokal terdampak maupun pengungsi. Dengan adanya bantuan tersebut, kemudian muncul adanya fakta bahwa terlepas dari keberatan Bangladesh atas Rohingya, Bangladesh menerima keuntungan tersendiri dengan masuknya arus pengungsi. Lapangan kerja meningkat

di beberapa sektor. Selain itu, infrastruktur juga kemudian diperbaiki. Bantuan dari adanya komitmen donor, kemudian terlihat bahwa Bangladesh menerima pengungsi Rohingya selain mendapat tekanan dari rezim pengungsi internasional, terdapat keuntungan tersendiri bagi Bangladesh khususnya penduduk lokal terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Daring

- IOM. 2018. *UN Launches 2018 Appeal for Rohingya Refugees and Bangladeshi Host Communities: Joint UNHCR/IOM Press Release* [online]. Tersedia dalam <https://www.iom.int/news/un-launches-2018-appeal-rohingya-refugees-and-bangladeshi-host-communities-joint-unhcriom-press> (diakses 11 Agustus 2018).
- Mizzima News. 2012. *Charity groups appeal Bangladesh ban on services* [online]. Tersedia dalam <https://reliefweb.int/report/bangladesh/charity-groups-appeal-bangladesh-ban-services> (diakses 4 Agustus 2018).
- UNDP. 2018. *UNHCR and UNDP sign MOU with Myanmar to support the creation of conditions for the return of refugees from Bangladesh* [online]. Tersedia dalam <http://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2018/UNDP-UNHCR-MOU-Myanmar.html> (diakses 11 September 2018).
- UNHCR. 2018. *Bangladesh and UNHCR agree on voluntary returns framework for when refugees decide conditions are right* [online]. Tersedia dalam <http://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5ad061d54/bangladesh-unhcr-agree-voluntary-returns-framework-refugees-decide-conditions.html> (diakses 13 Agustus 2018).
- _____. 2018. *UN launches 2018 appeal for Rohingya refugees and Bangladeshi host communities* [online]. Tersedia dalam <http://www.unhcr.org/news/press/2018/3/5aab2564/un-launches-2018-appeal-rohingya-refugees-bangladeshi-host-communities.html> (diakses 19 September 2018).

UNHRC. t.t. *Basic facts about the UPR* [online]. Tersedia dalam <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx> (diakses 4 Agustus 2018).

Wardhani, Baiq. 2012. *No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Myanmar-Bangladesh* [online]. Tersedia dalam [http://www.academia.edu/2339900/No Place Called Home Pengungsi Rohingya di Perbatasan Myanmar-Bangladesh](http://www.academia.edu/2339900/No_Place_Called_Home_Pengungsi_Rohingya_di_Perbatasan_Myanmar-Bangladesh) (diakses 2 April 2018).

_____. 2012. *Beggar Thy Neighbour: Pemiskinan Sistematis bagi Stateless Rohingya dan Dampaknya bagi Bangladesh* [online]. Tersedia dalam [http://www.academia.edu/2339889/Beggar Thy Neighbour Pemiskinan Sistematis bagi Stateless Rohingya dan Dampaknya bagi Bangladesh](http://www.academia.edu/2339889/Beggar_Thy_Neighbour_Pemiskinan_Sistematis_bagi_Stateless_Rohingya_dan_Dampaknya_bagi_Bangladesh) (diakses 2 April 2018).

_____. 2012. *The Plight of Stateless Rohingya and ASEAN's Responsibility* [online]. Tersedia dalam [http://www.academia.edu/9789183/The Plight of Stateless Rohingya and ASEAN s Responsibility](http://www.academia.edu/9789183/The_Pligh_of_Stateless_Rohingya_and_ASEAN_s_Responsibility) (diakses 2 April 2018).

Zaw, Min Htut. 2007. *The Gradual Exclusion of Rohingya since Burma's Independence* [online]. Tersedia dalam http://www.kaladanpress.org/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=786:the-gradual-exclusion-of-rohingya-since-burmese-independence&catid=61:the-first-rohingya-consultation-in-bangkok-2006&Itemid=38 (diakses 1 April 2018).

Buku

Farzana, Kazi Fahmida. 2017. *Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging*. New York: Palgrave Macmillan.

Jurnal

Anand, J.P. 1978. *Refugees from Burma*. Economic and Political Weekly, [Vol. 13, Issue No. 27, 08 Jul, 1978](#): 1100-1101.

Jacobsen, K. 1996. *Factors influencing the policy responses of host governments to mass refugee influxes*. The International Migration Review, 30(3), 655.

- Merry, dan Yessy Olivia. 2014. *Sikap Bangladesh Dalam Menanggapi Program UNHCR “United Nations Joint Initiative” Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011)*. Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 1, Juli 2014.
- Parnini, Syeda Naushin. 2013. *The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh*. Journal of Muslim Minority Affairs, 33:2, 281-297.
- Yesmin, Sultana. 2016. *Policy Towards Rohingya Refugees: A Comparative Analysis of Bangladesh, Malaysia and Thailand*. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), Vol. 61(1), 2016, pp. 71-100.

Laporan

- Amnesty International. 2016. *Rohingya: Persecuted In Myanmar, Neglected In Bangladesh*.
- Bhattacharjee, Aparupa. t.t. *Rohingya Crisis: Policy Options and Analysis*. Bangladesh Institute of Peace and Security Studies.
- ICC. 2018. *Prosecution's Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute* [online]. Tersedia dalam https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02057.PDF (diakses 12 Agustus 2018).
- Inter-Sector Coordination Group. 2018. *Support To Bangladesh Host Communities And Institutions In The Rohingya Refugee Response Joint Response Plan* [online]. Tersedia dalam [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iscg-support to host communities 26june2018.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iscg-support%20to%20host%20communities%2026june2018.pdf) (diakses 13 Agustus 2018).
-
- _____ . 2018. *Host Community Plans and Activities* [online]. Tersedia dalam [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/protection_sector plans hc9.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/protection_sector_plans_hc9.pdf) (diakses 13 Agustus 2018).
- Kapur, Roshni. 2018. *The Repatriation of the Rohingyas: A Flawed Bangladesh-Myanmar Agreement?* Dalam ISAS Working Paper No. 287– 16 March 2018.
- Lewa, Chris. 2010. *Unregistered Rohingya refugees in Bangladesh: Crackdown, forced displacement and hunger*.
- Milton et al. 2017. *Trapped in Statelessness, Rohingya Refugees in Bangladesh* dalam “International Journal of Environmental Research and Public Health”.

Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh. 2014. *Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh: A Summary Presentation*.

Strategic Executive Group. 2018. *Joint Response Plan (JRP) for Rohingya Humanitarian Crisis March-December 2018*.

_____. 2018. *Joint Response Plan (JRP) for Rohingya Humanitarian Crisis March-December 2018 Mid-Term Review*.

UNHCR. t.t. *Bangladesh* [online]. Tersedia dalam <http://reporting.unhcr.org/node/2539?y=2016#year> (diakses 21 September 2018).

_____. 2018. *UNHCR Submission on Bangladesh: 30th UPR session* [online]. Tersedia dalam <http://www.refworld.org/docid/5b081ec94.html> (diakses 1 Agustus 2018).

UNHRC. 2018. *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21*.

Xchange Foundation. 2018. *"The Rohingya Amongst Us": Bangladeshi Perspectives on the Rohingya Crisis Survey* [online]. Tersedia dalam <http://xchange.org/bangladeshi-perspectives-on-the-rohingya-crisis-survey/> (diakses 11 Oktober 2018).

Media Massa

Ahmed, Anis. 2012. *Bangladesh tells international charities to stop aiding Rohingyas* [online]. Tersedia dalam <http://in.reuters.com/article/2012/08/02/bangladesh-rohingyas-idINDEE8710A820120802> (diakses 2 April 2018).

Alam, Mayesha. 2018. *How the Rohingya crisis is affecting Bangladesh — and why it matters* [online]. Tersedia dalam https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/12/how-the-rohingya-crisis-is-affecting-bangladesh-and-why-it-matters/?noredirect=on&utm_term=.36ee301bf9ad (diakses 11 April 2018).

Al Jazeera. 2012. *Dhaka bans NGOs from helping Rohingya*. [online]. Tersedia dalam <https://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/08/2012827524058965.html> (diakses 7 April 2018).

- _____. 2017. *Bangladesh restricts movement of Rohingya refugees* [online]. Tersedia dalam <https://www.aljazeera.com/news/2017/09/bangladesh-restricts-movement-rohingya-refugees-170917004640300.html> (diakses 1 November 2018).
- Aung, Nyan Linn. 2018. *Officials promise MoU between Myanmar and UN agencies will be signed soon* [online]. Tersedia dalam <https://www.mmtimes.com/news/officials-promise-mou-between-myanmar-and-un-agencies-will-be-signed-soon.html> (diakses 11 September 2018)
- Dikarma, Karman. 2017. *Polisi Bangladesh Izinkan Pengungsi Rohingya Lintasi Perbatasan* [online]. Tersedia dalam <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/02/ovniv8-polisi-bangladesh-izinkan-pengungsi-rohingya-lintasi-perbatasan> (diakses 11 Agustus 2018).
- Habib, Haroon. 2016. *Bangladesh shuts border to Rohingya refugees* [online]. Tersedia dalam <http://www.thehindu.com/news/international/Bangladesh-shuts-border-to-Rohingya-refugees/article16683927.ece> (diakses 11 April 2018).
- Jawa Pos. 2018. *Myanmar Belum Siap Repatriasi*. Edisi Selasa, 3 Juli 2018.
- Karim, Rezaul. 2016. *Rohingyas not responsibility of Bangladesh alone* [online]. Tersedia dalam <http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/11/29/rohingyas-not-responsibility-of-bangladesh-alone.html> (diakses 31 Juli 2018).
- McLaughlin, Tim. 2013. *Bangladesh does deal on repatriation* [online]. Tersedia dalam <https://www.mmtimes.com/national-news/7226-bangladesh-does-deal-on-repatriation.html> (diakses 27 Agustus 2018).
- Nurfuadah, Rifa Nadia. 2017. *Alhamdulillah! Bangladesh Buka Pintu dan Minta Bantuan untuk Muslim Rohingya* [online]. Tersedia dalam <https://news.okezone.com/read/2017/09/27/18/1783835/alhamdulillah-bangladesh-buka-pintu-dan-minta-bantuan-untuk-muslim-rohingya> (diakses 29 Juli 2018).
- Paul, Ruma. 2017. *Bangladesh says agreed with Myanmar for UNHCR to assist Rohingya's return* [online]. Tersedia dalam <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/bangladesh-says->

[agreed-with-myanmar-for-unher-to-assist-rohingyas-return-idUSKBN1DP05N](#) (diakses 1 September 2018).

Power Point

Khan, Towfiqul Islam. 2018. *Implications of the Rohingya Crisis for Bangladesh*, dipresentasikan di “Third Meeting of the Bangladesh Economists’ Network” [online]. Tersedia dalam <https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/presentation-Implications-of-the-RohingyaCrisis-for-Bangladesh.pdf> (diakses 30 Oktober 2018).

Khatun, Fahmida. 2018. *Economic Implications of the Rohingya Crisis for Bangladesh and National Budget FY2019* [online]. Tersedia dalam <https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/05/Presentation-on-Economic-Implications-of-the-Rohingya-Crisis-for-Bangladesh-and-National-Budget-FY2019.pdf> (diakses 11 Oktober 2018).

Video Daring

Al Jazeera. 2017. *Bangladesh PM urges Myanmar to take back Rohingya refugees* [online]. Tersedia dalam https://www.youtube.com/watch?v=m1KoEu9k_sw (diakses 28 Juli 2018).